

**ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN KAPAL ILLEGAL FISHING  
OLEH TNI-AL TERHADAP KAPAL IKAN VIETNAM DI PERAIRAN  
NATUNA BERDASARKAN UNCLOS 1982**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**REYNALDO**  
**1410012111273**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019**

**REG.NO:16/SKRIPSI/HI/FH/02/VIII/2019**

**JURIDIC ANALYSIS OF ILLEGAL FISHING ARREST BY THE  
AL-TNI ON VIETNAM FISHING SHIPS IN NATUNA  
WATERS BASED ON UNCLOS 1982**

**Reynaldo,<sup>1</sup>Narzif, S.H, M.H, <sup>2</sup>Dwi Astuti Palupi, S.H., M.HUM <sup>1</sup>**

<sup>2</sup>Legal Studies Program, Lecturer at the Faculty of Law, University  
ofBunghatta

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Extraordinary Lecturer in the Faculty of Law  
Bunghatta University  
Email: klewangaldo@gmail.com

**ABSTRACT**

to issue a decision based on an economic perspective. Like Minister Illegal fishing is an illegal fishing act. But until now the problem of Illegal fishing still cannot be eradicated. A country that already has advanced technology in the defense and security sector must also have been exposed to the crime of Illegal fishing. (1) What is the regulation of fishing rights according to UNCLOS 1982? 2) how is Juridical Analysis of the capture of Illegal fishing Vietnam by the Navy? The research method used in this research is the normative legal writing method with secondary data sources, which consist of secondary legal materials, primary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are with Study Documents that are analyzed qualitatively. Research results 1) To find out the regulation of fishing rights according to UNCLOS 1982. national law in Indonesia defines the rights and responsibilities of the state in the use of the world's oceans, set guidelines for the business, environment and management of marine natural resources. 2) To find out a juridical analysis about the capture of Vietnamese illegal fishing vessels by Navy ships. In juridical cases, illegal fishing is tried based on the violations committed, then only sentenced. The provision of sentencing in the Law has not had a deterrent effect and cannot recover state losses. The government, in this case the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Indonesian Navy, the Prosecutors' Office needs Regulation No. 37 of 2017 concerning operational standards for the law enforcement task force on the eradication of illegal fishing (Illegal Fishing).

***Keywords: Crime, Fishing, Illegal Fishing, Waters***

**ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN ILLEGAL FISHING  
OLEH TNI-AL TERHADAP KAPAL IKAN VIETNAM DI  
PERAIRAN NATUNA BERDASARKAN UNCLOS 1982**

**Reynaldo,<sup>1</sup> Narzif, S.H, M.H, <sup>2</sup>Dwi Astuti Palupi, S.H., M.HUM <sup>1</sup>**

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Bunghatta

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum  
Universitas Bunghatta

Email: klewangaldo@gmail.com

**ABSTRAK**

*Illegal fishing* merupakan tindakan penangkapan ikan *illegal*. Namun hingga sekarang masalah *Illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *Illegal fishing*. (1) Bagaimanakah pengaturan hak penangkapan ikan menurut UNCLOS 1982? (2) Bagaimanakah Analisis Yuridis tentang penangkapan kapal *Illegal fishing* Vietnam oleh kapal TNI-AL? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan Sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data adalah dengan Studi Dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Untuk mengetahui pengaturan hak penangkapan ikan menurut UNCLOS 1982. hukum nasional di Indonesiamendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia, menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. 2) Untuk mengetahui analisis yuridis tentang penangkapan kapal *illegal fishing* Vietnam oleh Kapal TNI-AL. Secara yuridis kasus-kasus *illegal fishing* diadili berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman. Ketentuan penjatuhan hukuman dalam Undang-undang belum memberikan efek jera dan tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kejaksaan perlu mengeluarkan keputusan berdasarkan sudut pandang ekonomi. Seperti Peraturan Menteri No. 37 tahun 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal (Illegal Fishing)*.

**Kata Kunci :Tindak Pidana, Penangkapan Ikan, *Illegal Fishing*,  
Perairan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN ILLEGAL FISHING OLEH TNI-AL TERHADAP KAPAL IKAN VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA BERDASARKAN UNCLOS 1982”** Dan tidak bosan-bosannya penulis mengirimkan shalawat beserta salam berupa **allahumma shalia'llasyaidinnamuhammad wa'allaalihi syaidinna muhammad** kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril

maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayahanda MASRIZAL, S.P dan Ibunda NURHAYATI, S.PD yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta mendoakan penulis, memberikan didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. terkhusus kepada saudara-saudara penulis, Kakak-kakak dan Adik tercinta MINERVA RAHMADONNA, S.H , AGUNG PERMANA dan VIKY OKTANOV yang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibuk Dra. Susi Herawati, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Narzif, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan

beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya.

5. IbukDwiAstutiPalupi, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya.
6. Ibuk Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya.
7. Ibuk Nurbeti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibuk Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
9. Staff dan karyawan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik pusat maupun Faklutas Hukum Universitas Bung Hatta;
10. Kepada seseorang yang spesialGustiAyuyang telah berhasil membuat diriku kagum dengan kebaikan dan ketulusannya untuk selalu mendampingi dan memberikan dukungan dalam penyelesain skripsi

ini, sekali lagi terima kasih karena telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis.

11. Serta keluarga yang di Padang Paman, Tante dan Sepupu dari pihak ayah serta ibu berkat doa yang selalu kalian berikan serta dukungan agar penulis secepatnya menyelesaikan studi penulis sehingga membuat penulis bersemangat dan termotivasi untuk menyelesaikan studinya.
12. Para sahabat, rekan-rekan CNB dan M. Fadli Nasser, S.H selaku senior penulis yang telah meluangkan waktu dan ide, dalam membantu penyelesaian skripsi penulis ini, Brian Fieto Gemi, Rahmad (Marno), Ikhsan Hidayat ( Pembohong), aqsayelindraDevanja Reguler, Abdul Farhan, Putra Hutabarat, Julio Morinas Dan lain-lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang sangat berjasa oleh penulis dalam proses penyelesain skripsi penulis ini.
13. Seluruh kawan-kawan masyarakat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
14. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah banyak menorehkan pengalaman dan ilmu serta cerita-cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dengan harapan adanya suatu saran dan kritikan yang bersifat membangun guna untuk menambah wawasan dan referensi oleh penulis. Karena penulis menyadari karya berupa skripsi yang penulis buat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga

karya ilmiah berupa skripsi yang penulis buat ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan.

**Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.....**

Padang, 31Juli 2019

**REYNALDO**  
**1410012111273**



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan Hukum Tentang Penangkapan Ikan MenurutUNCLOS1982 .....	9
a. Hak penangkapan di wilayah laut dan jalur tambahan .....	9
b. Hak Penangkapan Ikan diwilayah ZEE .....	15
c. Hak Penangkapan Ikan Di Laut Lepas .....	20
2. Hak penangkapan ikan menurut hukum nasional .....	22
a. Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia .....	22
b. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia .....	24
c. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Peraturan hak penangkapan ikan Menurut UNCLOS 1982.....	32
a. UNCLOS 1982.....	34

2. AnalisisYuridisPenangkapanKapal <i>Illegal Fishing</i> KapalVietnamDi PerairanNatunaBerdasarkan UNCLOS 1982.....	35
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**